Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 2, No. 2, Oktober 2019

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA

Muh. Ardyansyah Makmur

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma Palopo
Email :ardyansyahmakmur93@gmail.com

Abstrak

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang demokrasi mempunyai hubungan erat dengan artikulasi aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang dirasakan oleh masyarakat adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian, pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara., dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner,observasi, dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisis statistic deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara cukup baik, yakni hal yang mempengaruhi karena masyarakat sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Pemilihan umum

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 3 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota di pilih melalui pemelihan umum, nilai demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan nilai yang orisinil dimiliki bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah nilai demokrasi.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang demokrasi mempunyai hubungan erat dengan artikulasi aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang dirasakan oleh masyarakat adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian, pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum (Soetrisno, 2000).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin perwujudan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekruitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal.

Menurut Sumaryadi (2005) Secara sederhana, pilkada adalah cara individu warga negara yang mendiami suatu daerah tertentu melakukan kontrak politik dengan orang atau

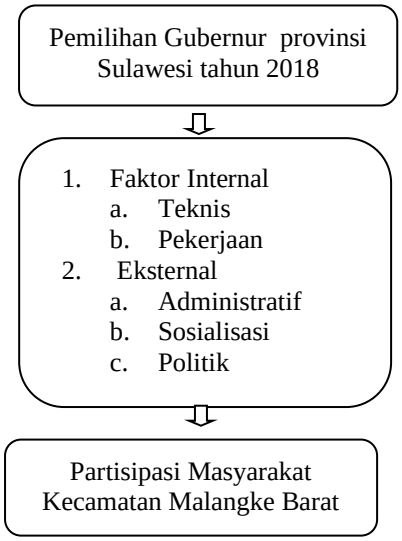
partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Dengan ikut serta berperan dalam pilkada secara tidak langsung berperan dalam membangun pemerintahan yang demokrasi.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 di lakukan secara serentak meliputi beberapa daerah di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam pilkada serentak untuk mencari pemimpin Gubernur periode 2018-2023, Kecamatan Malangke Barat adalah salah satu dari 11 kecamatan di kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kecamatan Malangke Barat merupakan bagian wilayah dari kabupaten Luwu Utara dan terletak di ujung sebelah selatan Kabupaten Luwu utara dengan luas wilayah 214,05 km^2 (BPS kabupaten luwu utara desember 2018).

Parsitipasi masyarakat di Kecamatan Malangke barat sangat di pengaruhi oleh etnisitas atau kelompok-kelompok yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, presepsi, dan orientasi. Karena adanya rasa kesukuan yang mempengaruhi apa yang ingin didukungnya. Sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih gubernur, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partipasi masyarakat dalam Pemilu menurut Sanit (2011) yang menjadi alur berpikir dalam penelitian ini yaitu faktor internal : (a) teknis (b) Pekerjaan dan faktor eksternal (a) administrasi (b) sosialisasi (c) politik

(Gambar 1)



Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang kurang dan masih ada masyarakat yang golput (golongan putih) yang di maksud dengan golongan putih di sini adalah masih ada masyarakat belum menggunakan hak sebagai pemilih, maka dari dilakukan penelitian tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilkada gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 di Kecamatan Malangke Barat kabupaten luwu utara.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan instrument utama yaitu menurut Sugiono (2008) menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu sebagai instrument utama dan observasi, telaah dokumentasi, dan literatur untuk menggambarkan kejadian yang terjadi.

Jenis Dan Sumber Data

Data primer yakni data yang diperoleh melalui responden melalui kuesioner dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui observasi, telaah dokumentasi dan literature yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yakni 1) Kuesioner yang diperoleh melalui responden sebanyak 99. 2) Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung. 3) Dokumen dan arsip yakni, lakukan telaah pustaka di mana dokumen-dokumen di anggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan di teliti baik berupa literature, jurnal , maupun karya tulis ilmiah.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara statistic desktriptif dengan menggunakan skala likert untuk mengkategorikan sikap pendapat responden dan menggunakan table frekuensi untuk deskripsi statistic jawaban pernyataan responden.

HASIL PENELITIAN

Menurut Sanit (2011), terdapat 2 faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yaitu faktor internal dan faktor eskternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada dua yang masuk pada kategori ini yaitu aspek teknis dan pekerjaan

Hasil rekapitulasi faktor teknis adalah nilai rata-rata persentasi 86,8% (Tabel 1) adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, Sedang berada diluar kota sedangkan Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melekat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS, Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan.

Tabel 1

No.	Faktor Internal : Teknis	Rata-rata persentase (%)
1	Apakah semua masyarakat di Kecamatan Malangke Barat sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan	97,5%
2	Apakah penyelenggara di TPS melayani anda dengan baik dalam pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	92,5%
3	Setujukah anda bahwa menggunakan hak pilih dalam Pemilu merupakan kewajiban warga Negara yang baik	70,0%
Rata-rata persentase		86.8%

Hasil rekapitulasi faktor pekerjaan nilai rata-rata persentasi 71,6% (Tabel 2) pemilih memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Faktor pekerjaaan di sektor informal, dimana penghasilanya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja, banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian, kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggal tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang.

Kondisi membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. faktor pekerjaan cukup singifikan pada pada faktori internal membuat pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih

Tabel 2

No.	Faktor Internal : Pekerjaan	Rata-rata persentase (%)
1	Apakah anda mengetahui tentang pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan	87,5%
2	Apakah anda ikut berpartisipasi dalam pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	65,0%
3	Apakah anda mengetahui manfaat ikut berpartisipasi dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan	62,5%
Rata- rata persentase		71.6%

Faktor ekstenal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggukan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik

Hasil rekapitulasi memiliki nilai rata-rata persentasi 92,3% (Tabel 3) yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak atau bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih

Tabel 3

No.	Faktor Eksternal : Administratif	Rata-rata persentase (%)
1	Apakah anda setuju tentang kepemilikan identitas kependudukan (KTP) warga negara Indonesia	100%
2	Apakah anda memperoleh surat panggilan untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan	92,5%
3	Apakah disediakan sarana dan prasarana di tempat pengumutan suara	85%
Rata- rata persentase		92.3%

Rekapitulasi faktor sosialisasi atau menyebarluaskan informasi pelaksanaan pemilu memiliki nilai rata-rata persentasi sebesar 90,7% (Tabel 4) sangat penting dilakukan dalam rangka memenimalisir golput melalui media guna sosialisasi visi dan misi figure calon kepala daerah.

Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislative dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil seperti RT/RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu di ikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan memenimalisir angka golput dalam setiap pemilu.

Tabel 4

No.	Faktor Eksternal : Sosialisasi	Rata-rata persentase (%)
1	Apakah anda pernah mengikuti acara debat politik calon Gubernur dan wakil Gubernur sulawesi selatan dalam pilkada 2018	72,5%
2	Apakah anda mengenal salah satu penyelenggara pemilihan gubernur provinsi Sulawesi selatan	77,5%
3	Apakah PAWANSLU kabupaten Luwu Utara sering mensosialisasikan tugas wewenang dan kewajiban pada pemilihan gubernur provinsi Sulawesi selatan	92,5%
Rata- rata persentase		90,7%

Hasil rekapitulasi faktor Politik dengan nilai rata-rata persentasi 29,1% (Tabel 5) erat kaitannya dengan ideologi partai politik dan figure calon yang mewakili partai politik, ketidak sepahaman dengan sebuah ideology dan sosok figure dapat menjadi salah satu pengaruh pemilih untuk tidak menyalurkan suaranya dalam pilkada.

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tidak percaya kepada partai tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya Kondisi-kondisi yang seperti di uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan

politisi yang menjadi calon dalam pemilihan umum

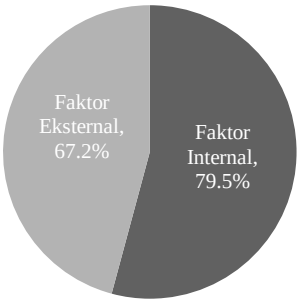
Tabel 5

No.	Faktor Eksternal : Politik	Rata-rata persentase (%)
1	Apakah anda berpartisipasi sebagai tim sukses salah satu kadidat calon gubernur provinsi Sulawesi selatan	30%
2	Apakah anda berpartisipasi dalam mengkampanyekan salah satu kadidat calon gubernur Sulawesi selatan	30%
3	Apakah anda mendapatkan intervensi atau ancaman untuk memilih salah satu calon gubernur provinsi Sulawesi selatan	27,5%
Rata- rata persentase		29,1%

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara memiliki skor yang berbeda-beda dari kuesioner. Pada faktor internal sebanyak 79,5% dan faktor eksternal sebanyak 67,5%.

(Gambar 2)



Faktor internal yaitu teknis dan pekerjaan pada pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Di Kecamatan Malangke Barat Penjelasan sederhana dari responden dikarenakan ada beberapa alasan mereka tdak terdata dari DPT.

Kurang tanggap penyelenggara melakukan *door tor door* demi kelengkapan dan penyempurnaan DPT karena akses komunikasi dan minimnya pemahaman masyarakat tentang cara terdaftar DPT

Sulitnya medan difaktor daerah yang terisolasi pada pendataan sebelum pemuktahiran data,dimana kondisi alam seperti daerah daerah terpencil di desa limbong wara, desa wara , desa pombakka yang kondisi sering di landa banjir pada saat musim hujan

Faktor ekstenal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggukan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik

Beberapa sebab penduduk di kecamatan Malangke barat tidak terdaftar di antaranya karena tidak dikenal, pindah alamat, dan meninggal. Kesulitan yang paling jamak ditemui oleh petugas pemutakhiran dan badan *ad-hock* di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah penduduk yang bersangkutan sudah pindah dari lingkungan tersebut, tetapi tidak melakukan pelaporan secara administratif. Ada pula data yang tercatat ganda dari Kemendagri akibat proses perekaman berulang.

Hal yang menjadi riskan dan berpotensi menghilangkan hak pilih di antaranya adalah proses *update* data kependudukan yang tidak menyeluruh. Catatan penting dalam proses sinkronisasi DP4 sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah bahwa KPU harus mengolah, menyesuaikan, dan melakukan pengecekan lapangan. Apakah penduduk yang bersangkutan masih menjadi penduduk di lingkungan tersebut, apakah masih aktif, dan memenuhi syarat syarat menjadi pemilih. Beberapa sebab penduduk tidak terdaftar di antaranya karena tidak dikenal, pindah alamat, dan meninggal. yang tercatat ganda dari Kemendagri akibat proses perekaman berulang.

Masih ada masyarakat tidak memilki KTP,jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT(Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administrtif KTP yang menjadi rujukkan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan disatu tempat.

Golput yang diakibat oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu

dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus dipublikasikan ditempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat.

Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segara melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk menimalisir terjadi golput adalah aspek adminitrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT upaya elektoronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam menimalisir golput yang disebabkan oleh faktor administratif.

Selain itu faktor politik berdasarkan hasil diketahui bahwa sebagian masyarakat tampaknya menganggap bahwa mengikuti kampanye itu tidak penting dan sebagian yang lainnya tidak mengikuti kampaye. Sementara itu pihak juru kampanye sendiri mengakui bahwa memang antusiasi masyarakat dalam mengikuti kampanye sangat rendah. Hal itu dikarenakan cara berkampanye yang kurang efektif sehingga bagi sebagian masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Oleh karena itu ,juru kampanye berusaha melakukan kampanye secara dialogis supaya lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Hal yang menarik dalam sebuah pemilihan dan kesempurnaan berdemokrasi terkhusus pada pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan di Kabupaten Luwu Utara kec. Malangke Barat tentulah masyarakat akan mengeluarkan beberapa pendapat yang intinya mereka yang minim pemahaman tentang sebuah pendidikan politik sehingga tak jarang di jumpai dengan sebuah kecurangan politik yang berbudaya di mata masyarakat dalam perpolitikan, bahkan banyak diantara masyarakat justru menjdi apatis terhadap sebuah politik dan mengartikan politik itu adalah sebuah kebohongan dan politik itu adalah sebuah janji yang bisa di tepati dan jarang tertepati .

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan di kecamatan malangke barat dengan menggunakan teori Sanit (2011) faktor internal yaitu 79,5% dan faktor ekternal yaitu 67,5% masyarakat mengatahui, memahami serta perperan aktif dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018. Dan hal ini pula masayarakat masih minim memahami manfaat pilkada dan hanya sebagian merasakan manfaat pilkada itu terkhusus di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Dari tabel angket pada hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang mengetahui manfaat ikut berpartisipasi dari angket tersebar menyatakan sangat mengetahui tentang manfaat ikut berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, hal ini juga menjadi pokok masalah dalam sebuah demokrasi minimnya sebuah pendidikan politik kelapisan masyarakat desa sehingga manfaat pilkada dan hasil dan belum terasa ke lapisan masyarakat desa. Hal ini dapat di liat dari jawaban dari sebaran angket sangat mengetahui hanya sekiran 30,3% yang cukup mengetahui 20,2% yang sangat di sayangkan ini kurang mengetahui 19,2% dan tidak tahu 30,3%.

Hal yang utama yang meski kita pahami pilkada bermanfaat agar masyarakat mewujudkan kedaulatan serta merasakan bahwa demokrasi terletak di tangan rakyat. Sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sebagai wadah sebagai pengganti pemerintah dan memilih pemimpin yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan kepada masyarakat Sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi dan terkahir sebagai sarana partisipasi masyarakat menyalurkan aspirasi politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tidak terlepas dari tujuan pilkada memilih wakil rakyat dan kepala daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, selain itu pilkada juga bertujuan memperoleh dukungan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada UUD 1945

Partisipasi masyarakat mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan

Faktor yang mempengeruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menurut Sanit (2011) terdapat 2 faktor yaitu internal (Teknis dan pekerjaan) dan faktor eksternal (Administratif, sosialisasi dan politik) yang mempengeruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dengan memiliki bobot nilai internal sebanyak 79,5% dan eksternal sebanyak 67,5% hal ini menggambarkan masih perlunya ada perbaikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang perlu di lakukan oleh berbagai pihak.

Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam berpartisipasi politik terutama dalam pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat karena partisipasi masyarakat juga menentukan kebijakan yang diterapkan kepala daerah maupun wakil rakyat terpilih. Panwanslu dan KPU harus sering mengsosialisasi tentang adanya pemilihan gubernur dan mensosialisasikan tugas, wewang dan kewajiban.

REFERENSI

A. D., Siti Irene. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Bungin, Burhan. 2005.*MetodePenelitian Kuantitatif*.Jakarta: Prenadamedia

Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Davis, Keith & John Newstrom. 2004. Perilaku Dalam Organisasi. ed. Ketujuh. Jakarta. Erlangga.

Sanit. 2011. Landasan Manajemen Pendidikan.Bandung : Remaja

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfa Beta. Bandung

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Soetrisno, Loekman. 2000. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Suharto, Edi. 2006. Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama. Bandung